

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN, DAN HIPOTESIS

#### 2.1. Kajian Pustaka

##### 2.1.1. Gerakan Sosial

Gerakan sosial didefinisikan oleh Fadhillah (2018: 4) sebagai suatu usaha bersama dalam satu waktu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tindakan kolektif baik melalui organisasi yang resmi ataupun organisasi yang secara spontan terbentuk. Biasanya gerakan sosial muncul sebagai akibat dari adanya ketidakpuasan, ketimpangan keadilan yang disebabkan oleh kasta sosial, kondisi politik yang tidak berimbang, keadaan ekonomi yang bersifat eksploitatif, penindasan yang dilakukan dari suatu golongan ke golongan yang lain, serta dari keadaan lain yang dilihat dari ideologi dan perspektif yang berbeda. (Manulu, 2016: 9).

Sukmana (2016: 4) menyatakan bahwa dalam gerakan sosial terdapat dua faktor yang menjadi ciri khusus gerakan sosial yaitu adanya kegiatan yang terorganisasi yang berkaitan dengan perubahan sosial sebagai tujuan dari kegiatan tersebut, sebagaimana yang dikutip dari Macionis (1999) dalam bukunya, Sukmana mendefinisikan gerakan sosial atau *social movement* adalah kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk menjalankan atau menghentikan suatu keadaan sosial yang disebabkan oleh perubahan. Sementara Spencer dalam Sukmana (2016; 5) menyatakan bahwa *social*

*movement* adalah usaha yang dilakukan secara kolektif demi tercapainya sebuah tatanan baru dengan ciri utamanya adalah gerakan kelompok dan objek perubahan yang dituntut.

Berdasar atas definisi-definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa gerakan sosial adalah suatu aktivitas yang menuntut suatu perubahan atas suatu perkara yang tidak disukai atau perlakuan tidak seimbang pada suatu komunitas tertentu pada suatu waktu secara bersama-sama dengan tujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang adil, aman, dan tidak ada kesenjangan yang melanggar hak asasi.

#### **2.1.1.1. Gerakan Sosial**

Seiring dengan perkembangan dan perubahan perilaku manusia karena berbagai faktor, terutama teknologi dan kondisi ekonomi. Gerakan sosial mengalami suatu perubahan yang bersifat ideologis pada poin-poin tertentu (Situmorang, 2013: 24). Gerakan sosial lebih menekankan pada isu-isu yang bersifat non-materialistik dan bukan menekankan pada gerakan yang dibuat sebagai akibat dari adanya penindasan yang terjadi karena adanya perbedaan tinggi dan rendahnya suatu kasta. (Suharko, 2006).

Gerakan sosial baru memiliki ciri-ciri ideal yang dapat dikenali, menurut Rajendra Singh (2010: 124) ciri-ciri ideal gerakan sosial baru adalah sebagai berikut;

- a. Gerakan sosial baru mencoba untuk menciptakan pertahanan ideologi dari pengaruh yang dibawa oleh ideologi luar melalui kontrol sosial,
- b. Gerakan sosial sangat berbeda dengan paradigma yang dibangun oleh Marxisme, gerakan sosial baru tidak lagi membahas tentang konflik dan kontradiksi yang muncul dalam suatu kasta. Gerakan sosial baru dianggap bukan sebagai gerakan karena adanya perbedaan kelas yang diperjuangkan kesetaraannya melainkan pada pusat perhatian dan penekanan yang bersifat non-materialistik,
- c. Gerakan sosial baru lebih melibatkan barisan akar rumput daripada pengaruh atau karisma seseorang yang berperan sebagai actor penopang aksi. Teknisnya adalah kelompok kecil akan bereaksi terhadap suatu isu tertentu yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi mereka, kemudian dilakukan suatu tindakan secara bersama dalam waktu yang sama untuk menata kembali hubungan antara negara, masyarakat serta kondisi ekonomi. Juga bertujuan untuk menciptakan ruang public yang dapat mewadahi aspirasi mereka,

- d. Struktur gerakan sosial baru dijelaskan melalui perbedaan cita-cita, tujuan, keinginan, orientasi dan heterogenitas basis sosial mereka.

Kemudian menurut Locher dalam Sukmana (2016: 22) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan gerakan sosial adalah;

- a. Efektifitas kepemimpinan
- b. Membangun citra yang positif
- c. Gagasan yang dapat diterima secara sosial
- d. Tujuan bersama yang disepakati
- e. Serta dukungan yang bersifat politik dan finansial

Pada akhirnya, Macionis dikutip oleh Sukmana (2016: 34) menyimpulkan proses gerakan sosial memiliki beberapa tahapan. Tahapan gerakan sosial tersebut adalah;

- a. Emergence/Tahap Kemunculan

Gerakan sosial didorong oleh suatu persepsi bahwa segalanya tidak berjalan dengan baik dan kesadaran yang muncul akibat dari beberapa isu tertentu.

- b. Coalescence/Tahap Penggabungan

Gerakan sosial harus dapat mendefinisikan dirinya sendiri dan mengembangkan strategi untuk going public. Gerakan juga dimungkinkan membentuk aliansi dengan organisasi lain untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan.

- c. Bureaucratization/Tahap Birokrasi

Gerakan sosial harus memiliki sifat-sifat birokrasi agar menjadi mapan sebagai suatu kekuatan politik. Sehingga gerakan sosial tidak beresiko mudah hilang.

d. Decline/Tahap Kemunduran

Gerakan sosial akan mengalami kemunduran akibat dari kehilangan pengaruh.

Dalam konteks penelitian ini, dukungan organisasi terhadap salah satu figure politik telah menggerakkan kelompok massa tanpa adanya rasa penindasan atau ketidakadilan yang dialami oleh suatu kelompok manapun, namun mempercayakan dukungan politiknya kepada seseorang untuk dapat menjadi pemimpin wilayah.

### **2.1.2. Kemunculan Analisis Gender**

Analisis gender menurut Mansour Fakih (2013: 3) muncul sebagai akibat dari adanya persoalan-persoalan kaum perempuan yang mengalami suatu kondisi yang tidak adil atas kehidupan. Penyebab keadaan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan diakibatkan oleh adanya hubungan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.

Pemahaman dan pembedaan yang jelas antara konsep seks dan gender sangat perlu untuk diketahui untuk analisis gender dalam masalah sosial yang dialami oleh kaum perempuan. Pembahasan mengenai konsepsi tentang gender biasa terjadi sebagai isu mendasar yang digunakan dengan tujuan

untuk menjelaskan masalah hubungan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan atau masalah hubungan sosial lainnya.

### **2.1.2.1. Definisi Gender**

Kata gender sudah sangat sering digunakan untuk membedakan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan jenis kelamin. Menurut Mansour Fakih 2013: 7) menyampaikan bahwa di Indonesia, masalah gender kerap diperbincangkan di kalangan non-pemerintah, kebanyakan uraian yang dibahas adalah tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan.

Menurut pengamatan Mansour Fakih (2013: 7) ambiguitas masih kerap terjadi, pemahaman yang tidak sesuai tentang sesuatu yang dimaksud dengan konsep gender dan hubungannya dengan perjuangan kesetaraan yang dikehendaki kaum perempuan. Terdapat banyak asal muasal terkait terjadinya ambiguitas tersebut. Permasalahan pertama yang muncul adalah dari adanya kata gender yang merupakan penyaduran dari bahasa Inggris dan arti yang didapat tidak dapat membedakan makna antara kata *sex* dengan gender. Maka daripada itu makna gender belum dibedakan yang berakibat tidak adanya makna yang jelas mengenai makna tersebut. Dampak dari adanya ambiguitas tersebut adalah kesulitan identifikasi makna yang diperlukan.

Oleh sebab itu, untuk memahami konsep gender, mengacu pada pernyataan yang disampaikan oleh Mansour (2013: 7-8). Maka wajib ada pembedaan makna untuk kata gender serta kata seks (jenis kelamin). Definisi perbedaan kelamin merupakan penyifatan atau pembedaan menjadi dua tipe kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada tipe kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia tipe pria adalah manusia yang memiliki saluran sekresi satu lubang, memiliki jakun, memproduksi sel untuk membuahi. Sedangkan perempuan memiliki kemampuan untuk memelihara janin dalam tubuhnya, memproduksi sel telur untuk dibuahi, memiliki saluran sekresi yang berbeda antara urin dan cairan kelamin, dan mempunyai kemampuan *feeding* kepada anak secara alami melalui bagian tubuhnya. Berdasarkan pada keterangan tersebut, maka ketentuan yang membedakan antara pria dan perempuan tidak bisa saling bertukar, meskipun dengan kemajuan teknologi tetap tidak dapat secara sempurna mempertukarkan ciri-ciri identik yang dimiliki secara khusus oleh perempuan dengan laki-laki.

Berbeda halnya dengan konsep gender. Menurut Mansour (2013: 8) konsep gender lainnya yaitu sifat yang menjadi pembeda bagi kaum pria maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan memiliki atribut yang melekat seperti sikap lemah lembut, paras menarik dengan sebutan cantik, mengedepankan emosional, atau keibuan. Di lain pihak, kaum

laki-laki dianggap memiliki tubuh lebih kuat, lebih mengedepankan pikiran rasional, dan bersifat pemberani. Namun pada kondisi di lapangan, sifat dan ciri yang menjadi khas gender tersebut dapat tertukar pada beberapa orang di kehidupan nyata. Artinya ada laki-laki yang lebih mengedepankan emosi daripada logika, lembut dan gemulai, menguasai pekerjaan yang berhubungan dengan urusan dapur dan merawat anak, sementara itu ada juga perempuan yang memiliki ketahanan fisik yang tinggi, mengedepankan logika daripada perasaan, memiliki kekuatan di atas rata-rata.

Penulis meyakini bahwa perbedaan gender ini dibentuk melalui suatu proses yang sangat panjang. Sebagaimana dikemukakan oleh Mansour (2013: 9) bahwa sejarah perbedaan gender (*gender difference*) antara manusia dengan kelamin pria dan wanita terjadi melalui suatu proses yang tidak singkat dan tidak sederhana. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan gender dibentuk karena banyak hal, diantaranya disusun, disampaikan kepada khalayak, diperkuat, bahkan dirangkai secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Sosialisasi gender yang sejatinya merupakan sesuatu yang dapat berganti menjadi hal yang dipandang sebagai kodrat Tuhan yang mutlak dan harus diikuti dan ditaati tanpa terkecuali. Padahal kondisi tersebut merupakan suatu hal yang bertukar sesuai dengan sifat dan lingkungan tempat tumbuh bagi laki-laki dan kodrat perempuan dengan suatu proses yang panjang.



Seiring dengan waktu konstruksi sosial gender mempengaruhi biologis masing-masing kelamin. Menurut Mansour (2013: 10) konstruksi sosial gender yang disampaikan secara turun temurun secara verbal dalam kurun waktu yang panjang secara perlahan mempengaruhi kondisi biologis dan psikis setiap manusia yang berada di suatu zaman. Misalnya, karena pola pikir yang dibangun dikalangan masyarakat tentang gender, kaum laki-laki adalah makhluk yang memiliki ketahanan fisik yang tinggi maka kaum laki-laki kemudian berusaha untuk melatih diri dan mensosialisasikan diri mereka sehingga menjadikan suatu motivasi untuk mewujudkan dogma yang telah ada dalam benak masyarakat, yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar. Di samping itu, stigma yang terjaga terhadap kaum perempuan adalah lemah secara fisik dan lembut dalam berperilaku, karena hal tersebut maka sejak masih dalam kandungan (karena kecanggihan teknologi sudah sapat melihat kelamin di masa usia kandungan mulai dari usia kandungan 4 bulan) bayi perempuan sudah diperlakukan sebagaimana yang biasa perlakuan terhadap bayi perempuan dan persiapan kelahiran bayi perempuan sesuai dengan adat kebiasaan seperti menindik telinga dan menyelimuti seluruh bayi agar memiliki bentuk tubuh yang jenjang (bedong - Bahasa Sunda)

Melalui pandangan tersebut, maka konstruks sosial gender dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh kondisi sosial yang dibentuk oleh masyarakat pada saat laki-laki atau perempuan masih dalam kondisi

bayi. Stigma masyarakat yang terus-menerus dibentuk dan dipersepsi untuk memperlakukan laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suatu dogma yang sangat sulit diubah.

#### **2.1.2.2. Gender Penyebab Marginalisasi Perempuan**

Perbedaan gender ini menjadi penyebab utama masalah sosial yang dialami oleh kaum perempuan. Paling sering muncul adalah termarginalisasinya kaum perempuan dalam suatu urusan akibat dari adanya perbedaan gender ini. Mansour Fakih (2013: 14) menyatakan bahwa marginalisasi yang disebabkan gender karena adanya perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Sementara itu, untuk sumbernya sendiri dapat berasal dari peraturan pemerintah, kemampuan daya nalar, tafsiran agama, tradisi yang masih dipegang dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Mansour Fakih (2013: 14) mengemukakan bahwa telah sejumlah penelitian yang berhubungan dengan usaha pemerintah dalam rangka memberantas kemiskinan yang menimpa kaum perempuan. Marginalisasi kaum perempuan banyak terjadi di berbagai tempat, selain terjadi di tempat pekerjaan, marginalisasi juga terjadi di dalam tatanan kehidupan rumah tangga, kehidupan

masyarakat atau adat kebiasaan dan bahkan negara. Marginalisasi perempuan menurut Mansour, telah terjadi dalam area organisasi terkecil seperti dalam rumah tangga. Marginalisasi ini diyakinkan oleh adanya aturan hukum tradisional maupun tafsir agama, dimana mengungkapkan bahwa kaum perempuan mendapatkan hak lebih sedikit daripada kaum laki-laki. Ada juga yang beranggapan bahwa perempuan tidak boleh mengambil keputusan apapun, segala pengambilan keputusan berasal dari kaum pria, baik itu ayah, suami, atau anak laki-laki yang sudah baligh.

### **2.1.2.3. Subordinasi Gender**

Perspektif gender ini tentu dapat memunculkan subordinasi terhadap perempuan. Mansour Fakhri menyatakan (2013: 15) bahwa anggapan kaum hawa itu tidak selalu rasional atau lebih mengedepankan emosi sehingga perempuan akan sangat riskan apabila ditunjuk sebagai pengambil keputusan sebagaimana tugas pemimpin sebagai penentu solusi, sebagai akibatnya dari adanya pemikiran tersebut adalah perempuan jarang sekali mendapatkan posisi atau jabatan sebagai penentu. Bahkan menurut pada tradisi zaman dahulu, kaum perempuan tidak perlu untuk sekolah tinggi-tinggi karena pada nantinya hanya akan mengurus urusan rumah tangga. Padahal sejatinya pendidikan anak pertama kali berasal dari kaum perempuan sebagai ibu mereka, maka daripada itu, kaum perempuan seharusnya dapat sekolah sebaik mungkin sehingga dapat

memberikan pendidikan kepada anak-anaknya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Praktik pembatasan perempuan untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik merupakan kesadaran gender yang tidak adil.

Subordinasi gender ini memiliki berbagai macam bentuk yang berbeda di wilayah dan waktu lainnya. Berdasarkan penelitian Mansour, pada golongan pria lebih didahulukan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, hak waris, keuangan dan lain sebagainya.

#### **2.1.2.4. Stereotype Gender**

Stereotype menurut Mansor Fakhri (2013: 16) menerangkan bahwa stereotipe merupakan pengidentifikasian atau penyematan citra terhadap kumpulan setiap subjek. Stereotipe ini menjadi salah satu penyebab utama ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan.

Kaum perempuan senantiasa disalahkan atas apa yang dilakukannya pada suatu kondisi tertentu, seperti misalnya pada saat perempuan berdandan dan menggunakan minyak wangi yang mengundang gairah kaum laki-laki sehingga terjadi pemerkosaan, kaum perempuan yang seharusnya menjadi korban kerap dipersalahkan atas kejadian tersebut.

#### **2.1.2.5. Kekerasan Gender**

Kekerasan gender merupakan agresi atau penyerangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sumber kekerasan sejatinya datang dari banyak sumber dalam

berbagai bentuk namun kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu akan senantiasa dianggap sebagai kekerasan terhadap gender dan atas gender tersebut. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. (Mansour Fakhri, 2013: 17).

Beberapa macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, diantaranya:

- a. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan.
- b. Serangan fisik berupa pemukulan, tendangan, lemparan terhadap perempuan termasuk kepada usia di bawah umur.
- c. Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin.
- d. Kekerasan yang dilakukan dalam bentuk prostitusi. Prostitusi yang dilakukan terhadap kaum perempuan sebenarnya adalah kekerasan seksual yang dialami oleh kaum perempuan dengan dalih kekurangan pendapatan dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
- e. Kekerasan dalam bentuk pornografi, yaitu, salah satu bentuk pelecehan terhadap kaum perempuan yang dirugikan oleh adanya tindakan-tindakan yang mengeksploitasi bagian perempuan itu baik dalam bentuk

fisik maupun non-fisik dengan tujuan keuntungan yang didapat oleh pihak lain.

- f. Kekerasan dalam bentuk sterilisasi keluarga berencana. Sterilisasi dalam program keluarga berencana lebih banyak ditujukan kepada kaum wanita dengan berbagai cara, mulai dari obat dan suntikan yang mengakibatkan perubahan hormon dan menahan siklus menstruasi, pemasangan alat dalam tubuh, hingga pada sterilisasi lain yang dapat memberikan dampak negatif pada tubuh perempuan.
- g. Kekerasan terselubung terhadap perempuan, yaitu meremas atau menyentuh bagian tubuh perempuan dengan suatu paksaan atau tanpa adanya persetujuan dari perempuan yang tubuhnya dinikmati.
- h. Tindakan kejahatan di muka umum. Seperti; berkelakar yang tidak senonoh, melukai atau mempermalukan, menginterogasi seluk beluk kehidupannya, meminta imbalan yang menggugah birahi, menyentuh atau menikmati bagian tubuh tanpa ada minat atau tanpa izin.

(Mansour Fakih, 2013: 17-20)

#### **2.1.2.6. Beban Kerja Gender**

Konsekuensi terhadap adanya anggapan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membereskan urusan

pekerjaan rumah tangga daripada pria, serta tidak cocok menjadi kepala keluarga menurut Mansour (2013: 21), menyebabkan perempuan dibebani oleh pekerjaan domestik rumah tangga sehingga menyebabkan perempuan harus memiliki tanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan kebersihan rumah, kerapian rumah dengan segala isinya, maka daripada itu mereka harus bekerja keras tanpa adanya kompensasi ekonomis atas keluarnya tenaga mereka.

Beban kerja yang dialami berdasarkan gender yang menimpa golongan wanita menurut Mansour Fakhri (2013: 21) menjadi penyebab salah satu terjadinya ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan. Hal ini diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan masyarakat atau keyakinan di masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, seperti semua pekerjaan rumah tangga sehari-hari, sayangnya pekerjaan tersebut dianggap sebagai pekerjaan yang bukan produktif. Berbeda dengan pekerjaan laki-laki yang kebanyakan dianggap sebagai pekerjaan yang produktif dan dapat menghasilkan imbalan sehingga dapat diperhitungkan secara ekonomi.

### **2.1.3. Kesetaraan Gender**

Konsep kesetaraan gender ini sudah berjalan dalam waktu yang sangat lama. Namun tetap saja dalam aplikasi merupakan sesuatu yang sangat rumit untuk diterapkan di era modern seperti sekarang. Titik temu mengenai definisi atas persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, hingga saat ini belum ada. Beberapa yang mengatakan bahwa maksud dari persamaan

derajat adalah kesetaraan hak dan kewajiban yang masih tidak dapat ditentukan objek dan subjeknya. Dan di sisi lain ada pula yang mengartikannya dengan konsep mitra kesejajaran antara perempuan dan laki-laki, yang juga masih belum jelas artinya. Kebanyakan sering mengartikan bahwa antara perempuan dan laki-laki mempunyai Hak yang sama dalam melakukan aktualisasi diri, namun tetap harus sesuai dengan kodratnya masing-masing. (Riant Nugroho, 2008: 59).

Persamaan gender diartikan juga sebagai suatu keadaan yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang memiliki hak yang sama untuk memberikan kontribusi dan pengakuan, supaya dapat menjalankan peran dan memberikan kemampuan dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, pendidikan, dan pertahanan & keamanan nasional (hankamnas) juga kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terbentuknya kesetaraan dan keadilan gender ini digambarkan dengan tidak adanya lagi diskriminasi atau pemisah antara laki-laki dan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak akses yang sama, partisipasi dalam bidang yang sama, kontrol atas suatu manajemen, serta mendapatkan hasil kompensasi yang sama dalam bentuk dan jumlah yang sama dalam suatu pekerjaan. Memiliki akses artinya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk mendapatkan timbal balik yang dibutuhkan dan mengambil suatu keputusan. Dengan kendali penuh atas sumber daya yang dimiliki maka kemampuan atas pengambilan keputusan dan kuasa akan kendali menjadi kendali pemilik



sumber daya itu. Keadilan gender adalah praktik dari adanya kesamaan perlakuan yang diterima oleh perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. (Ibid, Dalam Silvana, 2013: 11).

Kesetaraan gender memiliki arti secara harfiah kata setara disebut juga dengan seimbang, tidak memihak kepada salah satu pihak. Apabila disandingkan dengan kasus gender maka kesetaraan gender artinya adalah mengesampingkan ciri-ciri biologis dan lebih mengedepankan kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan. (Suryani, 2010: 8).

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, mengemukakan bahwa kesetaraan gender adalah suatu keadaan yang dimiliki oleh perempuan dengan beban dan tanggung jawab yang sama besar dan berpartisipasi dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan hankamnas serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. (Men-PP dalam Suryani, 2010:8)

Kesetaraan gender adalah laki-laki dan perempuan dapat memperoleh akses, kendali, partisipasi, dan manfaat yang sama dalam suatu kegiatan yang bersifat membangun masyarakat. Dengan cara pandang yang diberikan oleh masyarakat juga tidak membedakan hasil pekerjaan laki-laki dan perempuan yang diberikan oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki dalam berbagi peran yang mereka jalankan. (Suryani, 2010: 8).

#### 2.1.4. Definisi Politik

Secara umum, politik memiliki banyak arti, dari banyaknya definisi politik yang disampaikan oleh para pakar politik adalah mengenai politik sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan kemajuan dan kemunduran suatu Negara atau sistem pemerintahan. Tijani (2001: 3) mengutip pengertian politik yang tercantum didalam kamus Litre (1870) yang menyatakan bahwa politik sebagai ilmu memerintah dan mengatur negara. Sementara menurut Robert tentang definisi politik adalah seni untuk memberikan perintah dan mengurus tatanan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Carlton Clymer Rodee *et al*, (2002; 2-3) kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu kata polis yang memiliki dua arti yaitu negara dan kota sehingga disebut sebagai negara-kota. Pada zaman Yunani sebagai negara-kota tersebut, setiap individu saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) selama waktu kehidupannya. Pada saat manusia mencari dan menentukan posisinya dalam tatanan masyarakat, senantiasa mencari cara agar mendapatkan yang dibutuhkan agar sejahtera, atau juga saat usahanya untuk memaksakan kehendak dan kepentingannya terhadap orang lain, mereka sibuk dengan kegiatan yang dinamakan politik.

Kutipan definisi politik menurut Gabriel A. Almond *et al.*, 2004: 2)  
*“the activities associated with the control of public decision among a given people and in a given territory, where this control may be backed up by authoritative and coercive means. Politics refers to the use of these*

*authoritative and coercive means who gets to employ them and for what purpose.*” Apabila diartikan secara bebas sebagai berikut “Kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, dimana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya otoritatif dan (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Politik mengacu kepada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa.”

Indonesia memiliki sistem politik dalam suatu rangkaian dan tidak dapat saling dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan yang utuh sehingga saling memiliki keterkaitan, sistem politik Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan berjalannya waktu, diawali pada masa dimana masyarakat dipimpin oleh seorang raja, masa penjajahan bangsa asing, masa kepemimpinan awal, masa kekuasaan tunggal, dan masa setelah reformasi yang semuanya dipengaruhi oleh faktor pemerintahan yang berlaku. Indonesia menjalan sistem politiknya dengan melibatkan beberapa lembaga tinggi negara, partai politik dan pemilu, hukum serta pemerintahan daerah (Camela, 2018: 1).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka politik adalah segala macam kegiatan manusia dalam mengatur suatu organisasi dengan segala sumber daya yang dimilikinya dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan seluruh anggota organisasi dan masyarakat demi tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai. Dimana terdapat beberapa orang atau kelompok yang mengendalikan dan mengatur segala tatanan masyarakat umum agar tercipta

ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan kebaikan-kebaikan lainnya bagi kebanyakan masyarakat yang berada di suatu wilayah yang disepakati sebagai bagian dari kedaulatan politik.

Sistem politik tidak dapat dipisahkan dari perkumpulan organisasi politik yang berada di masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan elemen-elemen yang tergabung di dalamnya seperti partai, kebijakan, masyarakat, dan lain-lain.

#### **2.1.5. Gender dan Politik**

Politik gender dalam era digital seperti sekarang ini mengalami peningkatan yang sangat pesat apabila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya posisi politik yang penting di negara maju maupun berkembang yang diduduki oleh perempuan. Partisipasi perempuan dalam jabatan politik yang penting merupakan suatu bentuk keterwakilan perempuan dalam bidang politik untuk membangun suatu negara. Dengan demikian, politik gender menurut Rasyidin (2016; 48) adalah politik yang melibatkan kaum laki-laki dan perempuan dalam proses perumusan kebijakan negara dengan tegas diantara satu golongan dengan golongan lainnya. Agar politik gender ini berjalan dengan sempurna maka politik gender harus dibangun secara seimbang sehingga tidak bersifat patriarkis dalam berbagai kegiatan politik negara baik dalam partisipasi di parlemen maupun dibidang administrasi negara dan lain sejenisnya, tidak bole ada lagi diskriminasi dalam berbagai bidang.

Politik gender merupakan pergeseran paradigma yang sebelumnya diakui oleh masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki dianggap lebih superior dalam segala bidang menjadi sebuah pemikiran bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kelebihan pada suatu bidang dan kelemahan di bidang lainnya, dengan menerapkan suatu prinsip tanpa diskriminatif sehingga praktik emansipasi tidak akan terlalu sulit untuk diimplementasikan diberbagai aspek kehidupan. (Rasyidin, 2016;49).

Dengan demikian, politik gender merupakan suatu kebijakan yang mendukung pemusnahan diskriminasi yang dialami oleh suatu gender tertentu dan menciptakan kesempatan yang sama bagi kaum laki-laki maupun perempuan dalam kedudukan di berbagai macam bidang termasuk bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang social lainnya. Politik gender tidak hanya menganalisis pemberdayaan gender, namun juga menganalisis gender itu sendiri dan diskriminasi yang ditimbulkan dari suatu kegiatan tersebut serta tidak mengesampingkan perbedaan gender melainkan menyesuaikan tugas dan beban kerja sesuai dengan gender.

#### **2.1.6. Perempuan Dalam Politik di Indonesia**

Kiprah perempuan dalam kancah dunia politik di Indonesia telah dimulai pada masa kerajaan hingga masa era pasca-reformasi. Dalam setiap zaman terjadi pasang surut partisipasi dan peran perempuan dalam politik di Indonesia. Berikut ini aktivitas politik perempuan Indonesia dari masa ke masa menurut Audra Jovani (2014: 21-28)

- Yang pertama adalah di waktu penjajahan kolonial Belanda, ketika pada waktu itu Negara Kesatuan Republik Indonesia belum terbentuk. Tetapi rakyat di daerah telah melakukan aksi perlawanan terhadap para penjajah. Di beberapa daerah tersebut ada diantaranya yang dipimpin oleh perempuan. Para pemimpin-pemimpin tersebut diantaranya Cut Nyak Dien, Christina Martha Tiahahu, Cut Meutia, Nyai Ageng Serang.
- Perjuangan kaum perempuan dalam menuntut kesamaan hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan lain pada zaman Hindia-Belanda diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Keprihatinan Kartini menyaksikan kesengsaraan rakyat dengan adanya kolonialisme, yang diakibatkan karena tidak punya harta dan kebodohan. Kaum perempuan menjadi yang paling menderita dalam keadaan itu, karena selain menderita karena penjajahan, kaum perempuan juga menderita karena pengekangan adat-istiadat.
- Pada akhir tahun 1928 setelah peristiwa sumpah pemuda, kaum perempuan mendirikan organisasi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII) pada 22 Desember 1928. Dalam kongres PPII 1935, PPII mencetuskan kewajiban wanita Indonesia adalah dengan menjadi Ibu Bangsa yang menunjukkan wawasan yang lebih luas daripada sebelumnya. Oleh sebab itu, Hari Ibu diperingati pada tanggal 22 Desember. Pada tahun 1938 lahir

*motto* “Merdeka Melaksanakan Dharma” yang memiliki makna bahwa kaum perempuan secara merdeka dapat melestarikan kehidupan yang merupakan cara melaksanakan misinya dalam hidup itu.

- Masa pendudukan Jepang, kaum perempuan Indonesia dipaksa untuk bergabung dalam Fujinkai. Suatu organisasi perkumpulan wanita bentukan Jepang yang digunakan untuk beberapa macam kepentingan seperti mengangkat senjata, menyediakan dapur umum, menjadi istri pejabat, hingga menjadi pemuas nafsu para tentara Jepang.
- Pada tahun 1945, organisasi wanita lebih banyak terbentuk. Untuk menyatukan organisasi-organisasi tersebut secara nasional dibentuklah Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) dengan tujuan untuk menuntut keadilan sosial dan mempertahankannya, agar dapat menjamin keselamatan perikemanusiaan masyarakat Indonesia. Mulai dari tahun 1946 hingga saat ini, asosiasi diberi nama Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).
- Kaum perempuan pertama kali terjun langsung ke dalam dunia politik Indonesia, terjadi pada pemilihan umum (pemilu) 1955. Dengan hasil diperoleh anggota DPR perempuan sejumlah tujuh belas orang, yang artinya 0,7% dari seluruh anggota DPR yang berjumlah dua ratus lima puluh lima orang. Organisasi yang paling

aktif terlibat dalam aktivitas politik sebagai bagian dari partai politik pada masa itu adalah Parkiwa dari Partai Kebangkitan Bangsa (1950), Persatuan Wanita Murba (Perwamu), GERWANI dari Partai Komunis Indonesia, Wanita Demokrat Indonesia dari Partai Nasional Indonesia, Wanita Indonesia dari Partai Indonesia Raya. Dan beberapa lainnya.

- Organisasi perempuan berdasarkan profesi juga bermunculan di medio '50-an seperti Ikatan Guru Taman Kanak (1950), Ikatan Bidan Indonesia (1951), Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (1956), Ikatan Ahli Kecantikan Wijaya Kusumah (1958).
- Ikatan organisasi perempuan berdasarkan profesi berlanjut pada medio '60-an terbentuknya Ikatan Dharma Wanita (1965), Korps Wanita Angkatan Darat (1961), Korps Wanita Laut (1963), Korps Wanita Angkatan Laut (1963),
- Pada masa orde baru, organisasi wanita berdasarkan profesi semakin berkembang dan dengan visi yang lebih luas. Organisasi tersebut diantaranya Persatuan Wanita Olahraga Indonesia (1967), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), *Indonesia Business and Professional Women Associated* (1975) dan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (1971). Dengan banyaknya organisasi-organisasi wanita ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja untuk perempuan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat.



- Di Era Reformasi gerak-gerik perempuan tampak dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pemilihan anggota legislatif, partai politik wajib mengusulkan perempuan sebagai kandidat anggota eksekutif sebanyak 30%. Akan tetapi, pada pemilihan umum 2004 baru mampu menyediakan keanggotaan perempuan sebanyak 10% atau 7%, hanya 28 orang dari jumlah total anggota parlemen (sebanyak 550 orang) untuk periode 2004-2009. Jumlah ini belum dapat digunakan untuk menunjang aspirasi sebagai wakil rakyat. UU No. 12 tahun 2003 tentang partai politik, dalam pasal 65 ayat (1), partai politik diberikan anjuran untuk mencantumkan sebanyak 30% kaum perempuan yang dapat dipilih oleh rakyat dan berhak untuk menjalankan kegiatan kampanye. Dampak dari kegiatan tersebut nampak dalam pemilihan umum pada periode 2009-2014. Terlihat dalam data pencalonan rekapitulasi KPU menunjukkan jumlah keseluruhan caleg perempuan mencapai 34,6% atau setara 3.910 caleg perempuan dari total 11.130 caleg untuk DPR RI. Dari 38 partai politik peserta pemilu, PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) menjadi partai dengan calon perempuan terbanyak yaitu sebanyak (45%). Sementara itu, Partai Patriot mencalonkan calon legislatif paling sedikit yaitu 19,66%. Terdapat 8 partai yang menawarkan 40% lebih calon anggota legislatif perempuan, rata-rata partai lainnya yang berjumlah 24 partai mencalonkan anggota legislatif perempuan sesuai dengan

peraturan politik etis yaitu sebanyak 30%, sementara sisa partai peserta Pemilu yang gagal memenuhi jumlah 30 % calon anggota legislatif perempuan ada 6 partai. Bahkan calon legislatif perempuan dipercaya oleh beberapa partai untuk menempati nomor urut satu terbanyak seperti PBUI (38,4%), PPPI (32,5%), Partai Pelopor (30,4%), PIB (28,9%) dan Partai Buruh (28,9%). Partai yang lolos *parliamentary threshold* adalah Partai Demokrat mendapat urutan pertama yang menempatkan caleg perempuan pada urutan nomor 1 (satu) (18,2%), sedangkan partai-partai yang paling rendah tingkat pencalonan caleg perempuan adalah sebagai berikut dimulai pada urutan teratas adalah PKS (2,6%), PDIP (2,6%), PKNU (7,8%), Patriot (8,1%) dan PDS (9,1%). Sejalan dengan DPR RI, peningkatan terjadi pada DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dengan sama-sama mengalami peningkatan pada hasil Pemilu 2009. Pada pencalonan anggota DPD, calon perempuan mengalami peningkatan dari sebelumnya 8,8%, pada Pemilu 2009 meningkat jumlahnya menjadi 11,3%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27% atau 36 calon perempuan berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI. Pada situasi Pemilu 2004, calon perempuan relatif lebih kondusif untuk memenangkan persaingan dalam pemilihan umum anggota DPD karena pencalonan mereka tidak melalui partai politik. Kenaikan cukup signifikan juga terjadi di parlemen tingkat lokal. Hanya beberapa provinsi seperti NAD,

Jambi dan Bali yang jumlah anggota perempuan DPRD konstan dari Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Sementara data representasi politik perempuan di tingkat kabupaten/kota juga meningkat. Sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia memiliki keterwakilan anggota perempuan. Hal ini berbeda dengan Pemilu 1999.

### **2.1.7. Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan**

Pemberdayaan perempuan menurut Hubeis (2010:125) adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk memposisikan dirinya dalam suatu posisi yang strategis dengan memberdayakan kemampuan dan bakat yang dimilikinya sehingga memiliki peran dalam usaha pembangunan bangsa yang seiring dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan. Sementara Ulfah (2010: 16) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dalam pembangunan adalah upaya penguatan karakter perempuan dalam berbagai bentuk kehidupan sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan keterkaitan antara kebebasan pribadi dan aturan masyarakat yang berlaku. Pemberdayaan perempuan dipahami sebagai proses penumbuhan kesadaran kritis agar perempuan mampu berkembang secara optimal dan mampu membuat rencana mengambil inisiatif, mengorganisasikan diri, dan bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya. Kesadaran kritis tersebut hanya dapat dicapai apabila perempuan mampu melihat ke dalam diri mereka sendiri serta menggunakan apa yang didengar, dilihat, dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupan.

Pemberdayaan perempuan menurut Ulfah (2010:22) mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut;

a. Bimbingan sosial

Perempuan dapat diberdayakan dalam pembangunan untuk menyampaikan bimbingan sosial kepada masyarakat. Adanya segmentasi pada masyarakat tentu akan melibatkan perempuan dalam menyampaikan tema-tema tertentu dalam bimbingan masyarakat seperti manfaat dan penggunaan alat kontrasepsi oleh idan kepada para ibu dan lain-lain.

b. Bimbingan keterampilan

Perempuan juga dapat diberdayakan dalam melaksanakan bimbingan keterampilan kepada masyarakat tertentu terutama kaum perempuan. Keterampilan seperti memasak, menjahit, dan pekerjaan industri lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang lebih baik dikerjakan oleh perempuan.

c. Fasilitas atau bantuan sosial

Pemberdayaan perempuan dalam pemberian fasilitas dan bantuan sosial juga sangat diperlukan, beberapa masyarakat yang memiliki gender perempuan tentu akan lebih nyaman apabila menerima bantuan yang diserahkan oleh perempuan. Contohnya apabila seseorang menerima bantuan berupa pakaian, maka akan lebih nyaman apabila diberikan oleh gender yang sama.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif

Usaha pembangunan bidang ekonomi dapat mememberdayakan perempuan terutama pada saat kegiatan pelatihan atau bimbingan. Adanya keterlibatan kaum perempuan dalam bidang pembangunan ekonomi di masyarakat akan mampu mendorong *interest* kaum perempuan untuk produktif secara ekonomi dan dapat membantu tingkat pendapatan perekonomian rumah tangga

### 2.1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibuat dengan tujuan untuk membentuk struktur kerangka pikiran suatu penelitian. Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut;

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Judul/ Tahun	Objek Penelitian	Hasil Penelitian	Serial
1	Yeni Nuraeni dan Ivan Linlin Suryono/ Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia /2021	Meneliti tentang pekerja perempuan yang mendapatkan kesetaraan gender dalam pekerjaan namun terdapat kesenjangan dalam menerima upah	Hasil penelitian menunjukkan ketimpangan gender masih terjadi di Indonesia, namun seiring waktu ketimpangannya semakin mengecil, artinya kesempatan perempuan dan laki-laki semakin sama.	Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 20 No. 01 Tahun 2021 E-ISSN: 2656-5277
2	Wery Gusmansyah/ Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan	Membahas mengenai kesetaraan gender dalam berpolitik dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih belum bias menerima sepenuhnya perempuan untuk berpolitik, karena	Jurnal Hawa Vol. 1 No. 1 Januari-Juni

No	Nama/Judul/ Tahun	Objek Penelitian	Hasil Penelitian	Serial
	Politik Di Indonesia/ 2019	tujuan agar tercipta keadilan bagi laki-laki maupun perempuan	perempuan hanya akan mewakili kaum tertentu dan tidak dapat mewakili masyarakat secara umum	2019
3	Rani Andriani Budi Kusumo, Euis Sunarti dan Diah K Prandji/ Analisis Genderpada Keluarga Petani Padi dan Hortikultura di Daerah Pinggiran Perkotaan/ 2008	Meneliti tentang pembagian kerja dengan dasar perbedaan gender yang berimbang pada wewenang pengambilan keputusan	Hasil penelitian menemukan bahwa perempuan mendapati Batasan dalam hal pembagian kerja dan juga wewenang dalam pengambilan keputusan.	Jurnal Kependudukan Padjadjaran Vol. 10 No. 01
4	Abdulloh Fuadi dan Tasmin/ Gerakan Sosial Baru Di Ruang Publik Virtual/ 2018	Membahas mengenai Gerakan social baru kelompok organisasi masyarakat yang menggunakan media social sebagai sarana berbagi komunikasi	Hasil penelitian menyampaikan bahwa gerakan sosial baru itu bernama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang lahir sekitar akhir tahun 2016. Makalah ini mencoba menelaah GNPF MUI sebagai sebuah gerakan sosial baru yang berhasil memanfaatkan secara maksimal ruang publik virtual sehingga gemanya masih sangat terasa hingga setahun	Hanifiya: Jurnal Studi Agama-agama Vol. 01 No. 1. ISSN: 2089-8835

No	Nama/Judul/ Tahun	Objek Penelitian	Hasil Penelitian	Serial
			kemudian.	
5	Alan Sigit Fibrianto dan Syamsul Bakhri/ Gerakan Sosial Kaum Perempuan Melawan Euphoria Media Melalui Komunitas Hijabers Di Kota Surakarta/ 2018	Penelitian ini mengamati terkait perkembangan anak muda perempuan di Solo. Dengan menggunakan identitas agama mencoba untuk melawan fenomena pengguna hijab yang tidak sesuai norma	Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas yang dilakukan oleh hijaber-soo dapat mempengaruhi pengguna hijab yang masih belum sesuai dengan syariat islam untuk dapat mengikuti gaya hijab sesuai dengan norma yang ditetapkan	Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender. Vol 17 No 1 E-ISSN 2407- 1587
6	Budiman Pohan dan Yogi Suprayogi S/ Bike to Campus: Suatu Gerakan Sosial Baru Berbasis Komunitas Sepeda/ 2018	Penelitian ini membahas mengenai Gerakan social yang mencoba untuk mengajak masyarakat sadar akan polusi dari kendaraan bermotor yang dapat merusak lingkungan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan <i>Bike to Campus</i> komunitas USBC adalah gerakan sosial baru yang dibentuk oleh mahasiswa yang peduli terhadap isu etika environmentalis dan kesehatan. Perilaku kolektif dilakukan secara individual, berkelompok, maupun berkolaborasi dengan komunitas sepeda atau pemerintah kota.	Tesis Pascasarjana Sosiologi Universitas Padjadjaran
7	Hardisman/ Peranan Pemberdayaan Perempuan dan Analisis Gender pada Penentuan Kebijakan Pengentasan	Objek penelitian membahas mengenai peran perempuan dalam memberikan penyuluhan	Studi ini memperlihatkan bahwa kasus malnutrisi anak di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk tingkat pendidikan dan kesetaraan gender. Dalam perspektif gender,	Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol 6 No 1

No	Nama/Judul/ Tahun	Objek Penelitian	Hasil Penelitian	Serial
	Malnutrisi Anak di Indonesia/ 2011	dan pengentasan malnutrisi pada anak.	malnutrisi anak merupakan akibat dari kurangnya hak kepemilikan sumber daya bagi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Beban kerja berat perempuan dalam keluarga yang mempengaruhi kondisi kesehatan juga akhirnya berdampak pada kondisi gizi anak. Oleh karena itu, berbagai strategi yang dilakukan untuk meningkatkan status gizi anak harus mengandung nilai-nilai kesetaraan gender	
8	Andina Prasetya dan Yogi Suprayogi Sugandi/ Isu Gerakan Sosial Baru: Tempat Nasi Gratis Bandung/ 2019	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi kasi mengenai isu gerakan sosial baru yang berbentuk Tempat Nasi Gratis Bandung,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan social bisa dilakukukan oleh siapa saja dengan media apa saja untuk dapat mencapai tujuannya dalam menularkan ideologi kepada msasyarakat umum	Sosioglo bal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Vol 3 No 2 Juni 2019
9	Kunthi Tridewiyanti/ Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik "Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan	Objek penelitian ini membahas partisipasi perempuan dalam keterwakilannya sebagai anggota legislative	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada diskriminasi yang dialami oleh perempuan dalam keterwakilannya sebagai anggota legislatif	Jurnal Legislasi Indonesia Vol 9. No. 1



No	Nama/Judul/ Tahun	Objek Penelitian	Hasil Penelitian	Serial
	Perempuan di Legislatif’/ 2012			
10	Amin Bendar/ Feminisme dan Gerakan Sosial/ 2019	Penelitian ini membahas mengenai perempuan dalam dunia politik dan system ekonomi yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena dunia tidak mengistemawakannya	Hasil penelitian ini berfokus untuk membuka wacana kehidupan sosial pada tradisi teori sosial yang lebih luas dan peduli dengan studi tentang kekuatan sosial dan emansipasi manusia.	Al- Wardah: Jurnal Kajian Perempu an, Gender dan Agama Vol 13 No. 1
11	Sanny Nofrima dan Zuly Qodir/ Gerakan Sosial Baru Indonesia: Studi Gerakan Gejayan Memanggil 2019/ 2021	Penelitian ini mengelaborasi Gerakan Gejayan Menanggil 2019 secara lebih mendalam, meliputi latar belakang aksi, sarana mobilisasi massa, proses konsolidasi, dan isu yang diangkat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan Gejayan Memanggil ini telah menjadi titik tolak perubahan gerakan sosial di Indonesia, dimana pondasi yang dibangun tidak lagi berbasis pada perlawanan yang bersifat material, tetapi lebih berbasiskan pada isu-isu kemanusiaan, ketidakadilan, politik, lingkungan dan perempuan. Oleh sebab itu, ideologi yang berkembang berubah dari hal yang bersifat perlawanan kelas menjadi perlawanan identitas.	<a href="https://www.researchgate.net/publication/357772240">https://www.researchgate.net/publication/357772240</a>
12	Dewi Kartika dan Royke R. Siahainenia/	Penelitian ini memebahas mengenai	Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang virtual telah	Jurnal Ilmu Komunik

No	Nama/Judul/ Tahun	Objek Penelitian	Hasil Penelitian	Serial
	Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual Pada Kasus Satinah/ 2015	Gerakan social yang dilakukan dalam ranah dunia digital khususnya kasus Satinah	mampu menjadi ruang public bagi masyarakat untuk mempertahankan diri serta melakukan perlawanan melalui aktivitas kolektif warga yang digerakkan oleh aktor-aktor tertentu.	asi Vol 12 No 1
13	Sayekti Dwi Purboningsih/ Gerakan Sosial Baru Perspektif Kritis: Relawan Plitik Dalam Pilpres 2014 di Surabaya/ 2015	Tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan tentang proses terbentuknya kelompok relawan sebagai sebuah gerakan sosial baru dan mendeskripsikan proses terbentuknya kelompok relawan serta menganalisa dalam perspektif kritis.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan social berhasil mengangkat citra politik seseorang dalam pemilihan presiden di Indonesia	Jurnal Review Politik Vol 05 No 1 ISSN: 2088-6241

## 2.2. Kerangka Pikiran

Analisis gender berawal dari adanya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam banyak hal, seperti pendidikan, pekerjaan, pembagian harta,

hukum dan hak asasi manusia lainnya. Faktor penyebabnya bisa terjadi karena adanya marginalisasi, stereotipe, adat istiadat, hingga pada hukum itu sendiri.

Atas dasar kemanusiaan maka perlu diperjuangkan kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Kesetaraan gender merupakan adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai macam tatanan kehidupan.

Seiring dengan berjalannya waktu, perempuan semakin mendapatkan kesempatan dan hak yang sama, khususnya dalam kegiatan politik. Baik itu memimpin organisasi atau suatu daerah maupun menjadi perwakilan rakyat dengan menjadi anggota legislatif.

Aksi politik perempuan juga dapat bersifat langsung dan tidak langsung, selain menjadi seseorang yang dipilih oleh rakyat, perempuan juga dapat sesuka hati untuk memberikan dukungan politik kepada siapa saja yang mereka kehendaki. Begitu pula dengan seorang istri yang memberikan dukungan politik kepada suaminya yang berperan sebagai aktor politik dan pemimpin daerah.

Apabila coba digambarkan mengenai paradigma penelitian mengenai analisis gender aksi perempuan mendukung aktivitas politik suami adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikiran**

